

Catatan 52 Tahun Polisi Lalulintas

Polantas Harus Diisi K

Oleh Neta S Pane
Ketua Presidium Indonesia Police Watch

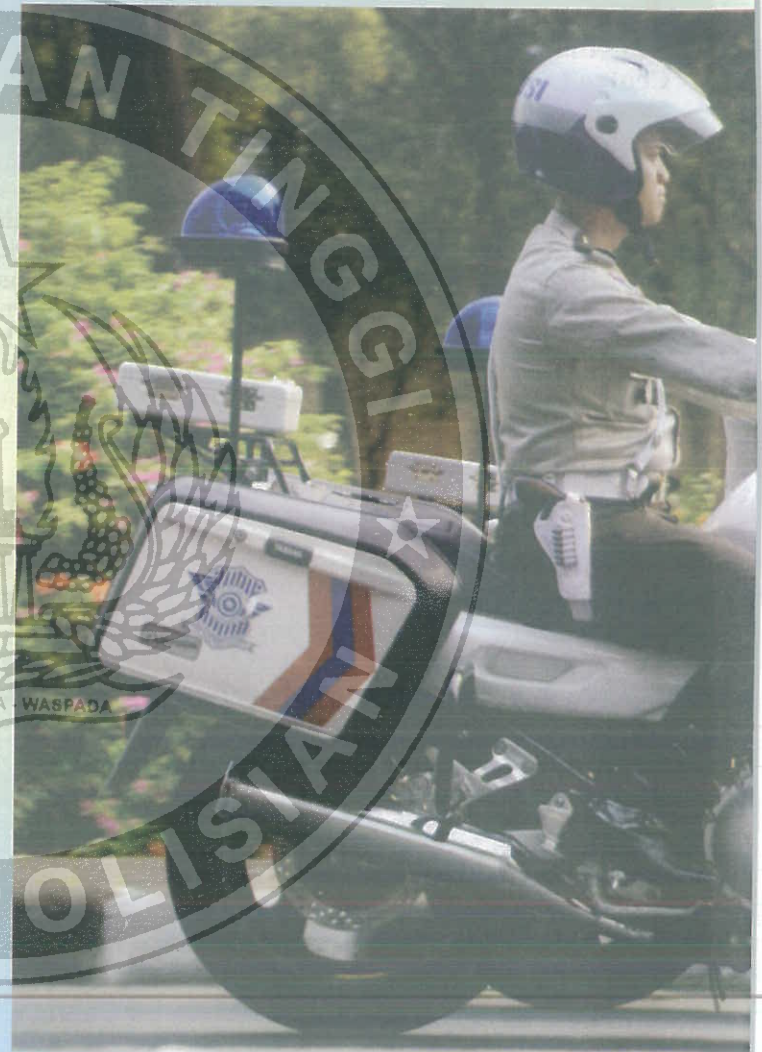
POLISI LALULINTAS sudah menorehkan sejarah tersendiri bagi negeri ini. Di awal kemerdekaan, Polisi Lalulintas menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa pengamanan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 berjalan maksimal. Di tahun 1957, aparat Polisi Lalulintas berhasil pula mengamankan Presiden Soekarno dari upaya pembunuhan dalam Peristiwa Cikini.

Di era reformasi, Polisi Lalulintas membuktikan kepada publik mengenai kemampuannya dalam mengungkapkan pemilik mobil yang membawa bom pada tragedi Legian Bali tahun 2002, yang kemudian menjadi titik awal pengungkapan pelaku bom Bali. Begitu juga dalam teror bom di Hotel JW Marriott tahun 2003 dan ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia pada 2004, Polisi Lalulintas kembali berhasil mengungkapkan data registrasi dan identifikasi dari mobil yang digunakan teroris.

Namun, tak ada gading yang tak retak. Keberhasilan demi keberhasilan yang diraih jajaran Polisi Lalulintas seakan tertutupi oleh ulah segelintir oknum, yang kerap melukai rasa keadilan masyarakat, baik di jalanan ataupun di lokasi-lokasi pelayanan. Akibat ulah para oknum ini masyarakat pun cenderung memberi stigma negatif pada jajaran Polisi Lalulintas. Seperti kata pepatah, ibarat noda setitik, rusak susu sebelanga.

Inilah risiko yang harus ditanggung Polisi Lalulintas sebagai etalase Polri, yang setiap saat berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posisi yang strategis ini membuat keberadaan Polisi Lalulintas terlalu gampang untuk dituding dan dipojokkan. Posisi ini membuat Polisi Lalulintas seperti berjalan di atas pedang, yang setiap saat bisa melukainya. Sementara kesejahteraannya sangat rendah. Tak sebanding dengan tanggungjawabnya yang sangat besar.

Tapi tiada pilihan, Polisi Lalulintas harus menerima risiko ini. Polisi Lalulintas senantiasa dituntut kemampuannya untuk bersikap profesional di antara tiga sisi



yang tak pernah bertemu, yakni stigma negatif masyarakat, kesejahteraan yang minim, dan tugas yang besar dari negara.

Tugas besar yang harus dijalankan Polisi Lalulintas, sesuai dengan visinya adalah menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, penegakan demokrasi dan hak asasi manusia sehingga terwujud keamanan, keter-

nder Terbaik Polri



tiban, dan kelancaran lalulintas. Sejauh mana visi ini sudah dilaksanakan jajaran Polisi Lalulintas dan sejauh mana tugas besar ini mampu diemban jajaran Polisi Lalulintas? Jawabannya tentu ada di hati masing-masing anggota Polisi Lalulintas.

SEJARAH

POLISI LALULINTAS ada karena kebutuhan ma-

syarakat. Dengan kata lain, masyarakat membutuhkan pelayanan yang prima dari Polisi Lalulintas. Sejarah menunjukkan hal itu. Di era tahun 1950-an, setelah hiruk pikuk awal Kemerdekaan Republik Indonesia mereda, irama kehidupan masyarakat mulai berjalan normal. Tingkat perekonomian masyarakat pun mulai tumbuh. Seiring dengan itu kehidupan ekonomi sebagian masyarakat mulai membaik. Jalan-jalan di kota-kota besar mulai diramaikan oleh lalu lalang kendaraan bermotor, mulai dari mobil, sepeda motor, maupun bus-bus angkutan umum.

Melihat perkembangan yang ada, pada 9 Januari 1952 Kepala Jawatan Kepolisian Negara mengeluarkan Surat Perintah No 6/IV/Sek/52, yang menjadi dasar bagi pembentukan satuan-satuan khusus, seperti Polisi Lalulintas, Polisi Perairan dan Udara. Surat Perintah ini keluar sebagai wujud Jawatan Kepolisian Negara untuk mengantisipasi perkembangan di masyarakat dan sekaligus memikirkan spesialisasi peran maupun tugas kepolisian dalam mengimbangi dinamika sosial di masyarakat.

Dalam Surat Perintah itu, satuan Polisi Lalulintas Jakarta mendapat tempat "istimewa". Keberadaannya mendapat tempat tersendiri. Sementara di daerah-daerah Polisi Lalulintas masih ditempatkan dalam bagian organisasi kepolisian. Di Jakarta tugas Polisi Lalulintas mencakup, pengurusan lalulintas, pengurusan kecelakaan lalulintas, pengurusan pendaftaran Surat Izin Mengemudi, Brigade Motor Keramaian, dan Komando Pos radio dan Perbengkelan.

Tiga tahun setelah itu, tepatnya pada 22 September 1955, keberadaan Polisi Lalulintas disempurnakan lagi. Kepala Jawatan Kepolisian Negara mengeluarkan Surat Perintah Nomor 20/XVI/1955 tentang Pembentukan Seksi Lalulintas Jalan di tingkat pusat, yang ditempatkan langsung di bawah Kepala Jawatan Kepolisian Negara. Sejak saat itulah muncul istilah Polisi Lalulintas dan tanggal 22 September dinyatakan sebagai tanggal kelahiran Polisi Lalulintas.

Bersamaan dengan itu tugas Polisi Lalulintas dikembangkan lagi menjadi empat fungsi. Pertama, mengumpulkan segala bahan yang bersangkutan dengan urusan lalulintas jalan.

Kedua, memelihara atau mengadakan peraturan, peringatan, dan grafik tentang lalulintas, jumlah pemakai

jalan, dan pelanggaran lalulintas jalan. Ketiga, mengadakan pengawasan dan pelaksanaan perundang-undangan lalulintas jalan dan menyiapkan instruksi guna pelaksanaan di berbagai daerah. Keempat, melayani sebab-sebab kecelakaan lalulintas jalan di berbagai tempat di Indonesia dan menyiapkan instruksi maupun petunjuknya, guna menurunkan atau mengurangi angka kecelakaan lalulintas.

Keempat fungsi Polisi Lalulintas tersebut masih terasa kontekstual hingga saat ini. Seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan tingginya mobilitas masyarakat Indonesia, keberadaan Polisi Lalulintas menjadi sangat strategis. Sebab itu, hadirnya aparat Polisi Lalulintas yang profesional menjadi suatu keharusan.

MEMBENAH KADERISASI

Melihat perkembangan stigma negatif di masyarakat sekarang ini, sikap profesional yang ditampilkan Polisi Lalulintas tentunya bukan sekadar melahirkan aparat yang memahami perundang-undangan dan masalah teknis perlalulintasan.

Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan hadirnya Polisi Lalulintas yang memiliki rasa kemanusiaan, memiliki kepedulian sosial, memiliki dedikasi yang tinggi, dan memiliki motivasi yang kuat, terutama dalam melaksanakan Tri Brata.

Hanya dengan keempat hal itu seorang aparat Polisi Lalulintas bisa mempunyai modal untuk melayani masyarakat dengan ikhlas, tulus, dan tanpa pamrih. Hanya dengan keempat hal itu seorang aparat Polisi Lalulintas mempunyai modal yang kuat untuk tidak menyakiti ataupun melukai rasa keadilan masyarakat.

Untuk melahirkan aparat yang demikian jajaran Polisi Lalulintas harus terus menerus memproses dan membenahi sistem kaderisasinya. Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengkaderan di jajaran Polisi

Lalulintas. Hal ini dimulai dari rekrutmen. Dalam rekrutmen ini harus ditelusuri secara detail, apa sesungguhnya motivasi seorang calon untuk bergabung menjadi Polisi Lalulintas. Apakah hanya sekadar untuk mencari uang, gagah-gagahan (arogan) atau ada motivasi lain. Dari penelusuran motivasi ini akan diketahui tingkat moralitas, mentalitas, dan sikap profesional seorang calon.

Kedua, pola pembinaan yang simultan, dengan sistem reward and punishment yang jelas. Ketiga, adanya kontrol yang ketat. Bagi, aparat yang nakal tiada kata maaf dan harus menyingkir dari jajaran Polisi Lalulintas. Ketiga hal ini tidak akan punya arti jika tanpa dibarengi oleh sikap atasan yang konsisten. Seorang atasan harus mampu terus menerus menunjukkan kredibilitas dan integritasnya. Ia harus senantiasa menjadi contoh dan tauladan bagi bawahannya.

Kendala yang dihadapi jajaran Polisi Lalulintas dalam menata kaderisasinya selama ini adalah masih

berkembangnya paradigma lama. Di era Orde Baru keberadaan Polisi Lalulintas cenderung dianggap sebagai "anak bawang".

Sehingga dalam rekrutmen dan pengkaderan jajaran Polisi Lalulintas hanya mendapatkan sisa-sisa. Calon terbaik dalam rekrutmen di Akademi Militer diberikan kepada Angkatan Darat. Sisanya baru diserahkan ke Kepolisian.

Calon terbaik dari sisa-sisa ini diberikan ke jajaran reserse. Sisa terakhir dari sisa-sisa tersebut barulah diserahkan ke jajaran Polisi Lalulintas. Sehingga ada



FOTO: JITEVA HARTINI

anekdot di masa itu bahwa lalulintas adalah tempat "buangan" bagi taruna yang memiliki ranking terbawah.

Paradigma ini memang harus segera diubah. Jajaran Polri sudah saatnya menyadari bahwa zaman telah berubah. Apa-apa yang dulu tak terlihat, saat ini menjadi terbuka.

Perkembangan zaman menuntut jajaran Polisi Lalulintas harus mendapatkan kader-kader terbaik di Kepolisian.

Perkembangan zaman telah menempatkan posisi

Polisi Lalulintas menjadi sangat strategis dibandingkan dengan kesatuan lainnya di Polri.

Polisi Lalulintas adalah etalase Polri. Bicara polisi berarti bicara Polisi Lalulintas. Masyarakat lebih mengidentikkan polisi sebagai Polisi Lalulintas. Hal ini disebabkan setiap saat masyarakat selalu melihat keberadaan Polisi Lalulintas, baik di jalanan ataupun di terminal angkutan. Ketidakhadiran Polisi Lalulintas menjaga prilakunya tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan Polri secara keseluruhan.

Sebab itu, tanpa kader-kader terbaik yang ditampilkan di dalam etalase tersebut Polri akan terus menerus berbenturan dengan masyarakat. Citra Polri akan sulit terbangun. Masyarakat akan terus menerus dihadapkan pada ulah dan tingkah pola kader-kader Polisi Lalulintas yang serampangan. Masyarakat akan terus menerus merasa dicerca rasa keadilannya di jalanan ataupun di lokasi-lokasi pelayanan.

Dalam paradigma barunya, Polri memang harus segera menyadari bahwa Polisi Lalulintas adalah etalasenya. Polri harus mau menyadari sudah saatnya menata dan membangun citra Polri dari jalanan, melalui keberadaan Polisi Lalulintas, melalui sikap profesional aparat Polisi Lalulintas, melalui sikap simpati yang terus menerus diberikan aparat Polisi Lalulintas, melalui kepedulian sosial Polisi Lalulintas, melalui rasa kemanusiaan aparat Polisi Lalulintas.

MENGIMBANGI DINAMIKA MASYARAKAT

Kampanye membangun citra Polri dari jalanan adalah sebuah kesadaran dalam mengimbangi dinamika masyarakat. Dengan kata lain, paradigma baru Polri perlu diarahkan untuk mencermati makin tingginya mobilitas masyarakat. Tanpa penataan yang maksimal terhadap citra polisi di jalanan, mobilitas masyarakat yang kian tinggi akan terganggu.

Masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di jalanan akan selalu berhadapan dengan sikap dan perilaku aparat yang tidak profesional.

Membangun citra Polri dari jalanan juga merupakan wujud dari sikap Peduli Kemanusiaan dari kepolisian. Sikap Peduli Kemanusiaan ini perlu terus menerus dikembangkan jajaran kepolisian, khususnya Polisi Lalulintas.

Melalui konsep membangun citra Polri dari jalanan ini ada dua point strategis yang dapat diraih. Pertama, masyarakat makin simpati dengan Polri karena aparatnya kian profesional di jalanan. Kedua, kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kian tinggi, sehingga angka kecelakaan lalulintas dapat ditekan.

Saat ini angka kecelakaan lalulintas makin memprihatinkan.

Lalulintas menjadi salah satu arena pencabut nyawa yang paling produktif. Selama lima tahun, dari 2001 hingga 2005, terjadi 76.812 kecelakaan lalulintas. Korban tewas dalam kecelakaan ini sebanyak 41.108 orang. Rata-rata korban tewas setiap tahun mencapai 8.222 orang. Artinya, dalam sehari ada 22 orang yang

mati sia-sia di jalanan.

Tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalulintas ini merupakan tantangan tersendiri bagi jajaran Polisi Lalulintas. Sebab visinya adalah menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, penegakan demokrasi dan hak asasi manusia sehingga terwujud keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas.

Berbagai terobosan memang sudah dilakukan jajaran Polisi Lalulintas untuk menekan angka kematian akibat kecelakaan ini. Berbagai kampanye untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya tersebut terus menerus dilakukan. Di jajaran Direktorat Polisi Lalulintas Polda Metro Jaya misalnya, berbagai strategi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat terus menerus dikembangkan. Bahkan, strategi ini didukung pula dengan keberadaan teknologi. Setidaknya hal ini terlihat dari keberadaan Traffic Management Center (TMC) yang dibangun Direktorat Polisi Lalulintas Polda Metro Jaya.

Dari pusat komando TMC dapat dipantau aktivitas lalulintas di berbagai lokasi strategis di kota Jakarta. Begitu pula keberadaan mobil patroli polisi dapat dipantau setiap saat. Masyarakat Jakarta pun dapat melakukan interaktif dengan TMC, baik untuk melaporkan peristiwa kejahatan ataupun untuk sekedar mengetahui lokasi kemacetan lalulintas. Hadirnya TMC merupakan sebuah tekad yang kuat untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat, baik dari jajaran Polisi Lalulintas umumnya maupun Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya khususnya.

Berbagai strategi, berbagai konsep, dan berbagai dukungan teknologi tentu tidak akan bermanfaat tanpa adanya dukungan yang kuat dari para pembuat kebijakan, terutama dalam melahirkan maupun menata sumber daya manusianya.

Dukungan yang tak kalah penting adalah seorang atasan senantiasa harus menjadi teladan bagi bawahannya. Sikap teladan itu tak sekedar menjadi motivasi tapi juga menjadi inspirasi bagi jajaran bawah.

Sikap teladan itu membuat kalangan bawah menjadi merasa punya keyakinan. Sikap teladan atasan akan membuat mereka merasakan bahwa pekerjaannya mempunyai makna. Mereka semakin merasa bahwa menjadi Polisi Lalulintas memang punya tujuan suci, yakni melindungi, mengayomi, dan melayani. Mereka akan semakin termotivasi untuk peduli pada rasa kemanusiaan.

Teknis perlalulintasan hanyalah sekadar alat, tapi roh dan jiwanya ada pada kepedulian, sikap santun, dan rasa kemanusiaan yang setiap saat bisa ditunjukkan oleh masing-masing anggota Polisi Lalulintas di jalanan. Inilah esensi dari Paradigma Baru Polri. Dirgahayu Polisi Lalulintas.

* * *